



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Kinerja Positif #Uangkita 2018
mendukung APBN 2019 Sehat, Adil, dan Mandiri

Scan untuk Unduh





“Membangun pondasi sumber daya manusia, tidak mungkin terjadi dalam sehari. Untuk itu pondasi sumber daya manusia fiskal policy-nya adalah mengalokasikan sisi belanja, 20% dari anggaran untuk tahun 2019 untuk pendidikan itu mencapai hampir Rp500 triliun. Hanya untuk pendidikan”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
pada Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (8/1)

RINGKASAN EKSEKUTIF



Penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,91 triliun (92,41% dari APBN 2018), atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012



Kepabeantasan Cukai tahun 2018 mencapai Rp 205,47 triliun (105,86% dari APBN 2018) atau tumbuh 6,74% dari realisasinya di tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan kepabeantasan dan cukai lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, yang hanya tumbuh 5,9%.



Realisasi PNBPN tercatat sebesar Rp407,06 triliun (147,79% dari APBN 2018), atau tumbuh 30,80% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNBPN tahun 2018 ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009.



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.444,44 triliun (99,31% dari APBN 2018), atau 14,15% lebih tinggi dari realisasi tahun 2017.



Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun (98,91% dari APBN 2018), atau tumbuh 2,13 persen.

Tanpa terasa tahun 2018 telah terlewati. Di tengah berbagai tantangan perekonomian global disepanjang tahun 2018, tercatat beberapa pencapaian penting, baik dalam hal makro ekonomi maupun pelaksanaan APBN, yang perlu diperhatikan dan dijadikan modal dasar dalam menyongsong tahun 2019. Kebijakan fiskal sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi memiliki peran yang penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Kebijakan fiskal yang terutama diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus didorong untuk mendukung tiga fungsi utamanya yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN juga terus diarahkan

untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang ditandai dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Kondisi ketidakpastian perekonomian global yang memicu perlambatan prospek ekonomi global akibat perang dagang dan pengetatan likuiditas selama tahun 2018, telah mampu dihadapi oleh perekonomian nasional dengan baik melalui bauran kebijakan fiskal, moneter dan struktural.

Outlook ekonomi nasional tahun 2018 diperkirakan tetap tumbuh dalam rentang target yang ditetapkan dan akan memberikan dorongan yang kuat bagi perekonomian di tahun 2019. Stabilitas ekonomi nasional juga terjaga dengan tingkat inflasi

yang terkendali disertai dengan tren penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan peningkatan cadangan devisa. Risiko ketidakpastian situasi ekonomi dan keuangan global yang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2019 sehingga tetap perlu diwaspadai pemerintah dan neraca perdagangan perlu terus diperbaiki dengan dukungan berbagai infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam empat tahun terakhir, APBN cukup optimal mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,25 persen pada Maret 2014 menjadi 9,66 persen pada September 2018. Tingkat kemiskinan dalam satu digit ini merupakan pertama kalinya dicapai pemerintah Indonesia. Pencapaian pada tahun 2018 ini antara lain didukung oleh keberhasilan program-program perlindungan sosial serta terkendalinya laju inflasi pada tingkat yang rendah. Pada periode yang sama, rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga turun dari 0,406 menjadi 0,389. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di masyarakat berangsur membaik. Diharapkan, kesenjangan pendapatan antara golongan menengah ke bawah dan golongan menengah ke atas akan terus semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70 persen pada Februari 2014 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018. Hal ini ditopang oleh keberhasilan Pemerintah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi serta berbagai program Pemerintah dalam mendorong terciptanya lapangan kerja, misalnya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat, kemudahan dan insentif bagi para pelaku usaha, serta pembangunan infrastruktur.

Ditengah tantangan perekonomian global yang tidak mudah, kinerja APBN tahun 2018 juga menunjukkan pencapaian yang sangat menggembirakan. **Untuk pertama kalinya sejak tahun 2011, realisasi pendapatan negara berhasil**

melampaui target yang ditetapkan dalam APBN (102,5 persen). Realisasi pendapatan negara tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau tumbuh sebesar 16,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 yang mencapai 7,1 persen.

Penerimaan perpajakan (pajak, kepabeanan dan cukai) yang mencapai Rp1.521,4 triliun, turut menopang peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 11,5 persen, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang sebesar 10,7 persen. Sepanjang tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp1.315,9 triliun, atau tumbuh 14,3 persen (15,5 persen di luar *Tax Amnesty*). **Capaian pertumbuhan di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.** Realisasi penerimaan pajak ini selain didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi terutama yang bersumber dari kegiatan konsumsi dan perdagangan internasional, juga didukung oleh keberhasilan berbagai program yang mendukung optimalisasi pemungutan perpajakan seperti meningkatnya

basis pajak setelah amnesti pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp205,5 triliun, atau 105,9 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar 194,1 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,7 persen ini didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan internasional, keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi, serta keberhasilan reformasi kepabeanan dan cukai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2018 mencapai Rp407,1 triliun (147,8 persen), atau tumbuh sebesar 30,8 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 18,8 persen. Hal ini antara lain didukung oleh kenaikan harga komoditas (minyak mentah dan batubara), perbaikan kinerja BUMN, serta perbaikan layanan Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara realisasi belanja negara selama tahun 2018 mencapai

Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen, yang merupakan penyerapan tertinggi selama lima tahun terakhir. Penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp836,2 triliun (98,7 persen) yang merupakan penyerapan terbesar dalam periode 2014-2018. Penyerapan yang optimal ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, lebih fokusnya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai akibat tidak adanya perubahan APBN, serta dukungan tambahan belanja untuk kegiatan penting seperti penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, penanggulangan bencana, penambahan alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta penguatan reformasi birokrasi. Keputusan pemerintah untuk tidak mengajukan perubahan UU APBN 2018, yang merupakan pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir, terbukti sangat efektif mendorong seluruh K/L fokus menjalankan rencana anggaran secara penuh pada tahun 2018.

Sementara itu, Transfer ke Daerah dan

Dana Desa terealisasi sebesar Rp757,8 triliun (98,9 persen) meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 96,8 persen. Penyerapan ini antara lain didukung oleh perbaikan mekanisme penyaluran yang dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output.

Realisasi defisit anggaran tahun 2018 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berhasil ditekan pada level 1,76 persen, jauh lebih rendah dibandingkan target dalam APBN yang ditetapkan sebesar 2,19 persen.

Realisasi ini merupakan yang terkecil sejak tahun 2012. Sejalan dengan hal tersebut, keseimbangan primer dapat ditekan mendekati nol, yaitu negatif Rp1,8 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai negatif Rp124,4 triliun. **Keseimbangan primer negatif Rp1,8 triliun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2012.** Perbaikan tingkat defisit serta keseimbangan primer ini tidak

terlepas dari membaiknya kinerja pendapatan negara sepanjang tahun 2018.

Dengan terkendalinya tingkat defisit pada tahun 2018 sejalan dengan tren penurunan pertumbuhan pembiayaan anggaran dari 29,8 persen tahun 2015 menjadi negatif 18,1 persen tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin meningkat.

Demikian pula dengan realisasi pembiayaan utang, yang lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp366,7 triliun atau hanya 91,8 persen target APBN. Hal ini sejalan dengan penurunan tren pertumbuhan realisasi SBN neto dari 36,9 persen tahun 2015 menjadi negatif 18,9 persen tahun 2018. Realisasi ini turut mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rasio utang pada level yang aman dan terkendali.

Pencapaian-pencapaian ini diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menyongsong tahun 2019 yang

diperkirakan masih akan diliputi berbagai tantangan yang terutama bersumber dari ketidakpastian perekonomian global. Berbagai tantangan yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2019 antara lain bersumber dari normalisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang *procyclical*, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ketidakpastian skenario *Brexit*, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan. Dalam World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada bulan Oktober 2018, Internasional Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3,9 persen menjadi 3,7 persen. Tingkat perdagangan dunia juga diturunkan menjadi 4,0 persen dari sebelumnya 4,5 persen. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, antara lain dengan terus mengelola APBN secara profesional, hati-hati dan bertanggung jawab.

REALISASI APBN 2018 s/d AKHIR DESEMBER 2018

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

	APBN 2018	Realisasi s.d. Desember 2018	% thd APBN
 PENDAPATAN NEGARA (A)	1.894,72	1.942,34	102,51%
 BELANJA NEGARA (B)	2.220,66	2.202,24	99,17%
 KESEIMBANGAN PRIMER	(87,33)	(1,80)	2,06%
 SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,94)	(259,90)	79,74%
 PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,94	300,36	92,15%

dalam triliun Rupiah

Realisasi APBN sampai dengan akhir Desember 2018

Sejalan dengan membaiknya perekonomian, realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2018 sangat sehat dan kredibel. Realisasi defisit anggaran diperkirakan mencapai 1,76% PDB atau lebih rendah dari target APBN 2018 yang sebesar 2,19% PDB. Level defisit anggaran ini yang terendah sejak tahun 2012. Sejalan dengan defisit anggaran yang semakin sehat di tahun 2018 ini, maka keseimbangan primer menjadi jauh lebih baik dari rencananya di APBN tahun 2018.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,34 triliun (102,51 % dari APBN tahun 2018), melebihi target APBN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, realisasi pendapatan negara tahun 2018 tersebut meningkat 16,56 % yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,91 triliun (92,41% dari APBN 2018), atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun

2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

2. Kepabeanan dan Cukai tahun 2018 mencapai Rp 205,47 triliun (105,86% dari APBN 2018) atau tumbuh 6,74% dari realisasinya di tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, yang hanya tumbuh 5,9%.
3. Realisasi PNBPN tercatat sebesar Rp407,06 triliun (147,79% dari APBN 2018), atau tumbuh 30,80% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNBPN tahun 2018 ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.202,24 triliun (99,17% dari APBN 2018), atau meningkat dibandingkan penyerapan belanja

negara tahun 2017 yang hanya sebesar 94,10% yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.444,44 triliun (99,31% dari APBN 2018), atau 14,15% lebih tinggi dari realisasi tahun 2017. Realisasi tersebut meliputi Belanja K/L sebesar Rp836,21 triliun (98,68% dari APBN 2018), lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 95,81% dan Belanja Non K/L sebesar Rp608,23 triliun (100,19% dari APBN tahun 2018), yang antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang Rp258,09 triliun dan subsidi sebesar Rp216,77 triliun.
2. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun (98,91% dari APBN 2018), atau tumbuh 2,13 persen.

Penurunan defisit anggaran diiringi dengan penurunan realisasi pembiayaan anggaran tahun 2018 yang mencapai Rp300,36 triliun atau lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang sebesar Rp366,62 triliun, atau menurun signifikan 18,07 persen. Angka realisasi yang telah disampaikan dalam edisi ini adalah angka sementara, sedangkan angka final Realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2018 akan disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Capaian-capaian yang telah dihasilkan dalam melaksanakan APBN 2018 menunjukkan bukti nyata bahwa Pemerintah telah dapat menjaga APBN sehat dan kredibel untuk mendukung stabilitas ekonomi.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tahun 2018 memberikan pondasi kuat bagi perekonomian tahun 2019

Kondisi ketidakpastian global yang dipicu oleh pengetatan likuiditas global dan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan mitra dagang utama yang berpengaruh secara langsung terhadap perlambatan ekonomi global, mampu dihadapi dengan baik oleh perekonomian Indonesia.

Hal ini ditandai dengan stabilitas ekonomi yang tetap dapat terjaga dan outlook pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2018 juga diperkirakan masih berada pada kisaran target yang ditetapkan. Outlook konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) tetap menjadi pendorong utama pencapaian outlook pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2018, yang secara bertahap diikuti oleh perbaikan neraca perdagangan. Kondisi ini diharapkan akan memberikan kepercayaan lebih kuat bagi investor untuk meningkatkan investasi di tahun 2019. Di samping itu,

beberapa pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Neraca perdagangan bulan November 2018 mencatatkan defisit sebesar USD2,05 miliar, dimana pada bulan sebelumnya (Oktober) defisit mencapai sebesar USD1,82 miliar. Defisit neraca perdagangan pada November 2018 terjadi karena penurunan nilai ekspor dari USD15,89 miliar pada bulan Oktober 2018 menjadi USD14,83 miliar pada bulan November 2018 atau turun sebesar 6,69 persen. Sementara itu, nilai impor pada periode bulan November 2018 tercatat sebesar USD16,88 miliar, lebih rendah dari impor bulan Oktober 2018 sebesar USD17,67 miliar. Selama Januari-November 2018 neraca perdagangan nasional tercatat mengalami defisit sebesar USD7,52 miliar. Defisit selama Januari-November 2018 lebih didorong

oleh defisit sektor migas, sedangkan untuk sektor non migas mencatatkan surplus.

Perkembangan laju inflasi menggambarkan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga yang selanjutnya mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Desember 2018, inflasi tercatat sebesar 0,62 persen sehingga laju inflasi selama tahun 2018 terjaga pada level 3,13 persen (yoy) dibawah target yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Terjaganya laju inflasi tahun 2018 didukung oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan mengelola risiko komponen *administered price*, terutama harga energi. Komponen inti (*core inflation*) juga masih bergerak pada kisaran 3 persen meskipun dengan tren sedikit meningkat. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan produktivitas guna

memastikan kecukupan stok dan langkah-langkah dalam stabilisasi harga. Pada tahun 2019, laju inflasi diperkirakan mencapai sebesar 3,5 persen yang masih akan dipengaruhi oleh tren peningkatan inflasi inti, seiring dengan peningkatan ekspektasi inflasi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Tekanan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlangsung selama awal tahun hingga September 2018 mulai agak mereda pada akhir tahun 2018, sehingga rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp14.247 per USD. Per 31 Desember 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tercatat pada level Rp14.481 per USD, atau terdepresiasi sebesar 6,89 persen (ytd). Perkembangan penguatan nilai tukar Rupiah sangat dipengaruhi oleh *risk appetite* dan kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan

Pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2018 tercatat sebesar USD120,7 miliar, atau meningkat USD3,5 miliar dibandingkan cadangan devisa pada akhir November sebesar USD117,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tahun 2019. Tren penguatan nilai tukar Rupiah mempengaruhi penurunan rata-rata tingkat SPN 3 bulan dimana pada lelang terakhir (21 November 2018), *yield* yang dimenangkan sebesar 5,796 persen, sehingga rata-rata *yield* selama 2018 tercatat

sebesar 4,95 persen, sedikit dibawah target sebesar 5 persen. Dalam tahun 2019, ketidakpastian kondisi keuangan global akibat ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate* masih akan memberikan tekanan terhadap pasar keuangan nasional.

Guna mengantisipasi risiko yang ada dan memperkuat fundamental ekonomi di tahun tahun 2019, penguatan posisi neraca perdagangan dan peningkatan minat investor tetap akan memperoleh perhatian yang besar. Perbaikan struktural di sektor riil juga tetap diperlukan untuk meningkatkan daya saing, perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya juga akan memperbaiki kinerja neraca perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan diyakini akan menjadi penopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Foto:
Media Keuangan

PENDAPATAN PAJAK

Penerimaan Pajak 2018 Mencapai 92,41 Persen, Tumbuh 14,33 Persen (15,53 Persen Di Luar Tax Amnesty)

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi
Penerimaan
Pajak 2018

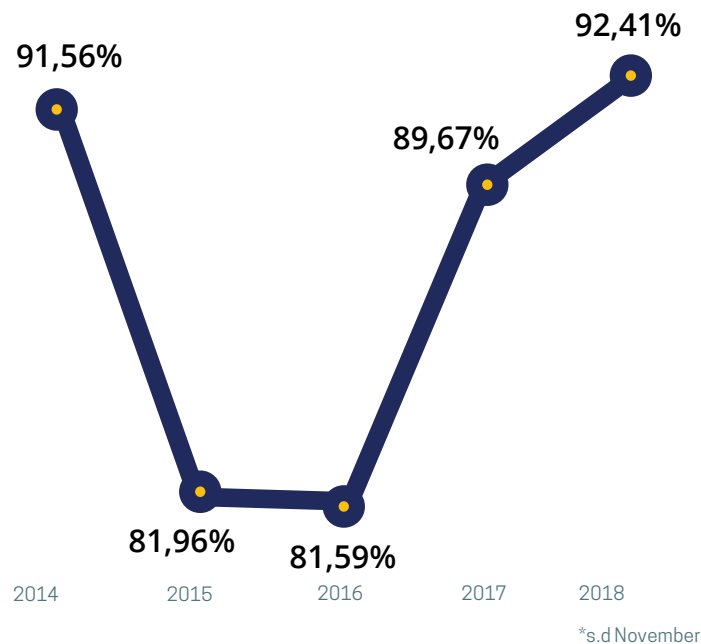
Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Des 2018		
		Δ% 2017 - 2018	% thd Target	
Pajak Penghasilan	855,13	751,49	16,19%	87,88%
- Migas	38,13	64,69	28,57%	169,64%
- Non Migas	817,00	686,80	15,14%	84,06%
PPN & PPNBM	541,80	538,20	11,96%	99,34%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	26,24	11,61%	96,971%
Jumlah	1.424,00	1.315,93	14,33%	92,41%

*angka sementara per 2 Januari 2019

Dari segi kinerja penerimaan pajak, 2018 merupakan tahun yang cukup menggembirakan. Sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp1.315,93 triliun, atau 92,41 persen dari Rp1.424,00

triliun yang ditargetkan dalam APBN 2018. **Capaian di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.**

Terdapat dua hal yang juga menjadikan capaian kali ini lebih istimewa. Pertama, capaian ini diraih



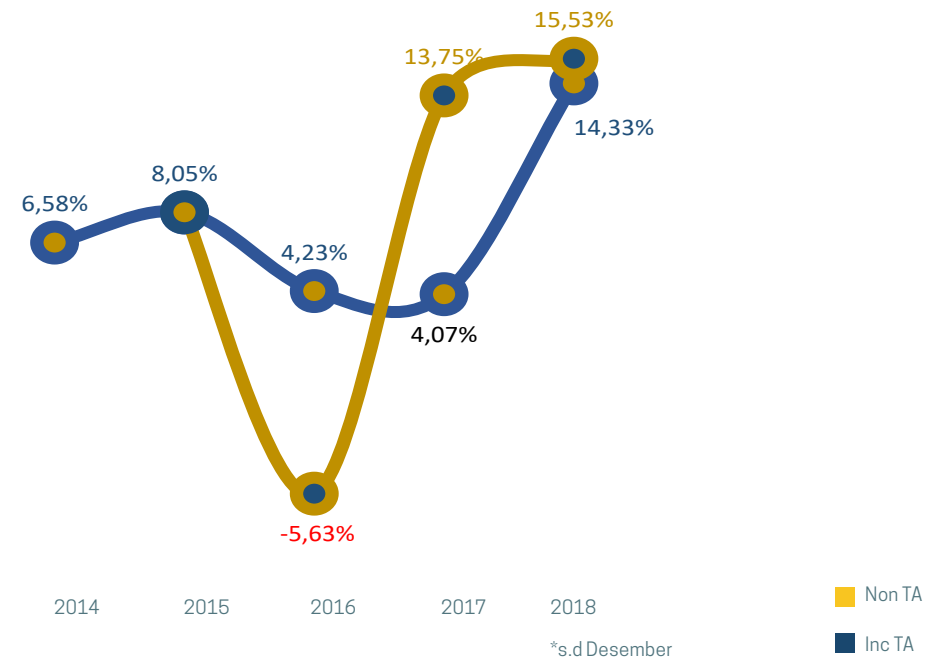
Realisasi Target Penerimaan Pajak

tanpa melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Kedua, capaian ini tetap mampu diraih meski terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) –dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen– dan program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).

Positifnya kinerja penerimaan pajak juga tercermin pada capaian pertumbuhannya. Apabila dibandingkan tahun 2017, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan *double digits*, sebesar 14,33 persen *year-on-year (yoy)*. Pertumbuhan

ini masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, yang mencapai 4,07 persen *yoy*. Bahkan capaian ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Apabila penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada triwulan I tahun 2017 dikeluarkan dari perhitungan (merupakan penerimaan yang bersifat *one-off* / tidak berulang sebesar Rp12,03 triliun), pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 15,53 persen *yoy*.

Tingginya pertumbuhan penerimaan pajak cukup menggembirakan, mengingat angka tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (*outlook* pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,15 persen dan inflasi 3,13



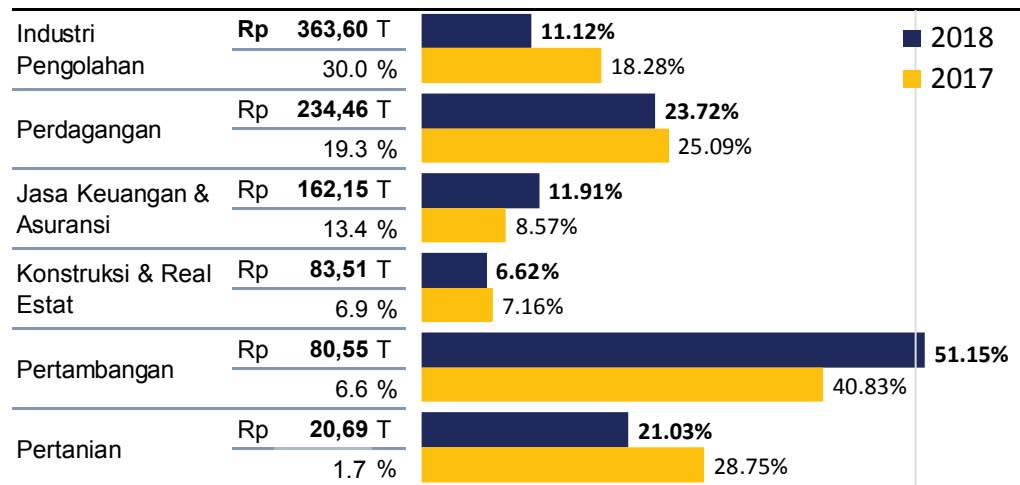
Pertumbuhan Penerimaan Pajak

persen). Apabila kita melihat faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai pendorong pertumbuhan alami, maka **peningkatan penerimaan pajak di tahun 2018 merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan usaha/effort yang dilakukan oleh DJP** seperti kegiatan Pengawasan Wajib Pajak (WP), Pemeriksaan, Penagihan, Penyidikan dan Ekstensifikasi.

Apabila kita lihat lebih dalam, sumber pertumbuhan berasal dari kinerja jenis-jenis pajak utama yang memang cukup menggembirakan, umumnya mengalami pertumbuhan *double digits*. Pertumbuhan PPh

Nonmigas mencapai 15,1 persen ditopang oleh pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, yang mulai merasakan efek pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran masyarakat mendorong pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21. Pertumbuhan signifikan juga dicatatkan oleh pajak-pajak atas impor yakni PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor, didorong oleh meningkatnya nilai impor Indonesia di tahun 2018.

Ditinjau dari sisi sektoral, sepanjang tahun 2018 ini sektor-sektor usaha utama mampu mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak *double digits*. Sektor Industri



Penerimaan Pajak Sektoral

Pengolahan tumbuh 11,12 persen yoy, Perdagangan tumbuh 23,72 persen yoy, serta Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 11,91 persen yoy. Pertambangan tumbuh 51,15 persen yoy, masih dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas tambang. Pertanian tumbuh 21,03 persen yoy, sedangkan Konstruksi dan Real Estat masih mampu tumbuh 6,62 persen.

Berkat pertumbuhan penerimaan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, angka *tax ratio* Indonesia pun menunjukkan perbaikan, dari sebelumnya pada tahun 2017 di angka 10,7 persen terhadap PDB, di tahun 2018 ini *tax ratio* meningkat menjadi 11,5 persen.

Secara umum apabila kita lihat capaian realisasi penerimaan pajak

terhadap target APBN, pertumbuhan penerimaan pajak dan *tax ratio*, pencapaian tahun 2018 menunjukkan trend perbaikan/*rebound* setelah mengalami perlambatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil positif reformasi perpajakan, baik dalam bentuk reformasi kebijakan perpajakan maupun transformasi organisasi, yang difokuskan untuk membangun kesadaran pajak yang berkesinambungan (*sustainable compliance*), peningkatan basis perpajakan (*tax base*), dan penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan. Reformasi perpajakan juga menjadi sangat penting perannya untuk menghadapi tantangan perubahan struktural-institusional perekonomian Indonesia, di tengah gencarnya disrupsi teknologi.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Menoreh Jejak *Milestone* Baru Reformasi Perpajakan Selama 2018

Tahun 2018 telah berakhir, sejumlah *milestone* telah ditoreh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama setahun terakhir. Utamanya membuat organisasi besar ini mampu lebih memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Di bidang organisasi, DJP telah mengoperasikan satu Kantor Wilayah (Kanwil) baru dan sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru per 1 Oktober 2018. Kanwil baru tersebut adalah Kanwil DJP Kepulauan Riau.

Sedangkan sebelas KPP yang baru meliputi KPP Madya Bogor, KPP Pratama Aceh Besar, KPP Pratama Jambi Pelayangan, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, KPP Pratama Serang Timur, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Jombang, KPP Pratama Pontianak Timur, KPP Pratama

Banjarmasin Selatan, KPP Pratama Balikpapan Barat, dan KPP Pratama Samarinda Ulu.

Kesebelas KPP baru tersebut merupakan hasil pemecahan dari 10 KPP yaitu KPP Pratama Banda Aceh, KPP Pratama Jambi, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, KPP Pratama Serang, KPP Pratama Cirebon, KPP Pratama Mojokerto, KPP Pratama Pontianak, KPP Pratama Banjarmasin, KPP Pratama Balikpapan, dan KPP Pratama Samarinda, sehingga dari semula 341 KPP kini menjadi 352 KPP yang melayani wajib pajak.

Di bidang pelayanan, DJP terus mengembangkan Layanan Pajak di Luar Kantor (LDK) sejak 2014. Hingga akhir 2018 sudah ada penggunaan Layanan Pajak di Luar Kantor atau juga disebut *Mobile Tax Unit* (MTU) di 19 Kanwil dan 306 kantor vertikal.

Layanan Pajak di Luar Kantor bertugas memberikan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Ada dua jenis LDK, yaitu Layanan Pajak dengan lokasi permanen dan Layanan Pajak dengan lokasi nonpermanen. Layanan Pajak dengan lokasi permanen antara lain meliputi Pos Pajak, Pos Pengamatan Pajak, Pos Pelayanan, Loket Pajak, dan Gerai Pajak. Sedangkan Layanan Pajak dengan lokasi nonpermanen antara lain meliputi *drop box*, mobil pajak keliling, pojok pajak, dan alat transportasi lainnya.

Khusus untuk tahun 2018, ada penambahan Layanan Pajak di Luar Kantor berupa 8 unit Mobil Pajak di empat Kanwil dan empat KPP. Keempat Kanwil tersebut adalah Sumatera Utara II, Jawa Barat I, Bali, dan Kalimantan Selatan dan Tengah. Sedangkan keempat KPP yang mendapat Mobil Pajak adalah KPP Pratama Bireun, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Situbondo, dan KPP Pratama Baturaja.

Selain itu mulai 24 Mei 2018, Ditjen Pajak juga menyediakan Layanan Registrasi NPWP via Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau OSS (*Online Single Submission*). SABH

sendiri adalah pelayanan pengesahan akta perseroan secara daring yang dioperasikan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dengan adanya Layanan tersebut maka pelaku usaha badan dapat langsung mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan dan memperoleh NPWP saat mengurus Akte Pendirian Perusahaan melalui SABH tanpa perlu ke KPP. Sedangkan pelaku usaha investor perorangan dapat langsung mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan memperoleh NPWP saat mengurus Surat Izin Usaha melalui OSS tanpa perlu ke KPP.

Masih di bidang peningkatan pelayanan, Ditjen Pajak telah memperluas penggunaan aplikasi e-Bupot (Bukti Potong) dari 15 Wajib Pajak terpilih menjadi 168 Wajib Pajak terpilih mulai Juli 2018. Dengan adanya aplikasi e-Bupot tersebut maka Wajib Pajak dapat langsung membuat Bukti Potong dan melaporkan SPT-nya langsung melalui aplikasi tersebut. Ditjen Pajak juga mulai mengoperasikan *Taxpayer Account Management* (TAM) secara piloting di 33 KPP pada 2018.

Di bidang Basis Data, Ditjen Pajak telah melakukan pemutakhiran dan migrasi basis data atas lebih dari 1 juta Master File Wajib Pajak (MFWP), meliputi 225 ribu WP Badan, 543 ribu WP OP, dan 247 ribu WP Bendahara.

Ditjen Pajak selama 2018 juga melaksanakan *cleansing data* terhadap 471 ribu Tanda Terima SPT dan 511 ribu SPT.

Sementara itu di bidang peraturan, Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 untuk mendorong peran serta masyarakat, khususnya UMKM, dalam kegiatan ekonomi formal dan lebih berkeadilan. PP Nomor 23 Tahun 2018 telah memberikan relaksasi berupa penurunan tarif PPh dari sebelumnya 1 persen dari omzet menjadi 0,5 persen dari omzet mulai 1 Juli 2018.

Penurunan tarif tersebut dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan skema kemudahan dan penurunan tarif ini pemerintah juga berharap akan dapat menambah basis pembayar pajak baru di tahun-tahun mendatang.

Jika dilihat dari sisi penerimaan, secara umum tercatat setoran PPh Final atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tahun 2017 sebesar Rp5,84 triliun tumbuh 148 persen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2014 - 2017).

Selama Semester I tahun 2018, setoran pajak berdasarkan PP 46/2013 masih mencatat angka pertumbuhan 11,35 persen dibanding periode

yang sama tahun sebelumnya. Namun dengan implementasi PP 23/2018, dampaknya tercermin pada penurunan setoran jenis pajak ini pada Semester II tahun 2018 sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh negatif 31,79 persen dibandingkan setoran pajak pada Semester I tahun 2018.

Meski demikian dari sisi kepatuhan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya PP 23/2018 yang tercermin dalam peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran maupun jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibukukan. Setelah berlakunya PP 23/2018, terdapat 662 ribu wajib pajak yang sebelumnya pada Semester I tahun 2018 tidak melakukan pembayaran (baik PPh Pasal 25 maupun PPh Final 1 persen PP 46/2013), namun pada Semester II tahun 2018 662 ribu wajib pajak tersebut melakukan pembayaran PPh Final 0,5 persen PP 23/2018. Peningkatan kepatuhan ini secara jangka panjang diharapkan akan menutupi penurunan nominal penerimaan yang diakibatkan oleh penurunan tarif pajak.

Selama 2018, DJP terus melakukan reformasi perpajakan di bidang Organisasi dan SDM, IT, Basis Data dan Proses Bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi pondasi *milestone* baru di 2019. DJP terus hadir dengan *milestone* baru untuk Indonesia yang lebih baik.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

KEPABEANAN DAN CUKAI

Peningkatan perdagangan internasional dan kebijakan kepabeanan dan cukai mendorong performa penerimaan DJBC.

Peran Bea Cukai

Revenue Collector merupakan salah satu fungsi strategis yang diemban Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk berperan aktif dalam program pembangunan nasional. Peran tersebut menjadikan DJBC ikut bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan anggaran negara. Selain bertanggung jawab atas penerimaan kepabeanan dan cukai, DJBC juga mengelola penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya seperti PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Impor. Total penerimaan yang dikelola DJBC tersebut memberikan sumbangsih sekitar **25 persen** dari total pendapatan negara pada APBN tahun 2018 yang sebesar Rp1.894,72 triliun. Bahkan bila dilihat dari target penerimaan perpajakan yang Rp1.618,09 triliun, DJBC berkontribusi mencapai 27,5 persen.

Tantangan Penerimaan

Pada tahun 2017 lalu, DJBC berhasil melampaui target yang diamanatkan

APBN/P tahun 2017 yang sebesar Rp189,1 triliun dengan capaian Rp192,3 triliun atau 101,7 persen. DJBC bahkan mencatatkan surplus di semua komponen penerimaannya yaitu bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan Cukai. Prestasi yang sama tentu diharapkan pada tahun 2018 ini, meskipun ada beberapa hal atau kondisi yang berbeda dengan tahun lalu.

Pertama adalah jumlah target yang tentu lebih besar dibandingkan target tahun lalu, yaitu sebesar Rp194,1 triliun. Target penerimaan kepabeanan dan cukai memang selalu naik dari tahun ke tahun. Target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2018 sendiri meningkat sebesar 7,6 persen dibandingkan target pada APBN/P 2017 lalu, padahal peningkatan target APBN tersebut tidak selalu diikuti oleh faktor pendorong penerimaannya.

Penerimaan BM menghadapi tantangan dengan semakin banyaknya

kegiatan importasi yang komoditasnya bertarif nol persen, ditambah semakin banyaknya utilisasi skema *Free Trade Agreement* (FTA) dari tahun ke tahun. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerjasama perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan dalam bentuk FTA dimaksudkan untuk mendorong perdagangan nasional dengan negara mitra, meskipun di sisi lain menjadi *downside risk* terhadap penerimaan BM.

Situasi perdagangan dunia, seperti perang dagang Amerika Serikat vs Tiongkok, juga menyebabkan kontraksi pada perdagangan global. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa situasi perang dagang yang terus meningkat akan menghambat pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan tahun depan. Bahkan dalam pertemuan di Bali lalu, IMF memperkirakan perang dagang akan mengakibatkan kerentanan atas

tekanan yang tiba-tiba, terutama bagi negara-negara berkembang.

Penerimaan BK terkendala rendahnya harga komoditas primadona ekspor Indonesia, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), di pasar dunia yang sepanjang tahun ini berada di bawah harga patokan ekspor. Situasi regional dan kondisi cuaca di situs pertambangan dan pengapalan turut memberikan ketidakpastian atas terjadinya kendala pasokan/produksi (*supply disruption*).

Penerimaan cukai masih menghadapi kendala keterbatasan barang kena cukai (BKC). Hingga saat ini BKC hanya terdiri dari cukai hasil tembakau (CHT), minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA). Cukai atas kemasan plastik menjadi permasalahan tersendiri karena telah dibebankan pada APBN tahun 2018 sebesar Rp500 miliar, meskipun peraturan yang menjadi dasar dan tata laksana pemungutannya belum juga selesai.

Kedua adalah faktor kebijakan, dimana pada tahun 2018 merupakan dimulainya implementasi PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang merelaksasi PMK nomor 20/PMK.04/2015 dalam hal pelunasan CHT. Akibat yang ditimbulkan adalah konsekuensi terjadi pergeseran penerimaan CHT dari tahun berjalan ke tahun berikutnya. Hal tersebut menjadi perhatian khusus, mengingat nilai rupiah yang diperkirakan bergeser menjadi penerimaan tahun 2019 jumlahnya cukup signifikan. Apalagi kontribusi penerimaan CHT terhadap penerimaan secara keseluruhan sangat besar, yaitu mencapai 75 persen.

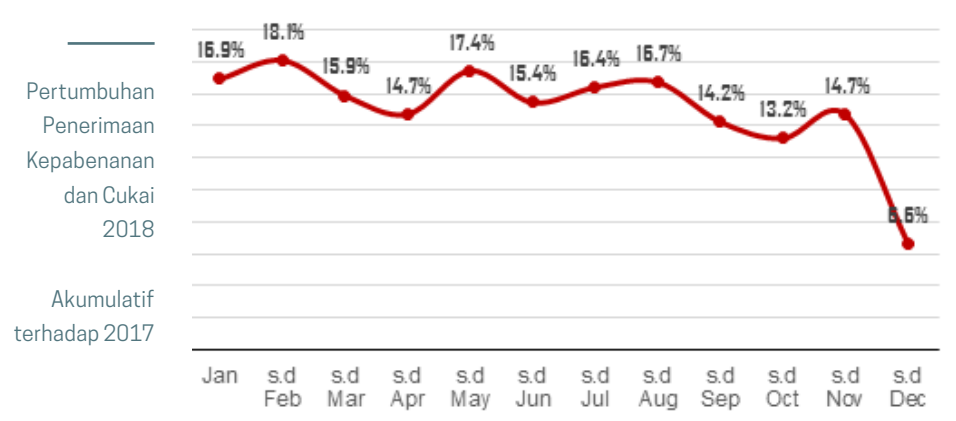
Kinerja Penerimaan Tahun 2018

Upaya pemerintah mengatasi dampak perang dagang, mampu dimaksimalkan untuk mendorong penerimaan, melalui percepatan layanan dan penguatan efektifitas

pengawasan. Kontribusi positif juga dihasilkan melalui perbaikan kebijakan kepabeanan dan cukai, seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi / PICE-BT. Ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang efektif, aktifitas ekspor-impor yang masih tumbuh, serta peningkatan permintaan komoditas mineral tambang, turut berperan positif dalam pertumbuhan penerimaan.

Hasilnya, kinerja positif terjadi di semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai, yaitu BM, BK, dan cukai. Bahkan penerimaan PDRI lainnya, yaitu PPN impor, PPNBM impor, dan PPh pasal 22 impor juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan BM dikontribusikan oleh pertumbuhan devisa impor yang tinggi sejak awal tahun, dimana mampu tumbuh di kisaran 15 persen.



Kebijakan impor dalam rangka pengamanan pasokan kebutuhan dalam negeri dan pengendalian harga komoditas tertentu, turut memberikan andil yang positif. Implementasi kebijakan program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) menjadi penggerak utama penerimaan *extra effort* BM melalui peningkatan *taxbase* para importir berisiko tinggi (IBT) yang mencapai 57,59 persen.

Kinerja penerimaan BK didorong oleh harga komoditas di pasar dunia yang mulai membaik dan relatif stabil. Tingginya permintaan dari negara mitra dagang juga turut berkontribusi atas pertumbuhan penerimaan BK. Kontributor terbesar penerimaan BK sendiri adalah komoditas mineral tambang, yang mampu tumbuh lebih dari 100 persen dibanding tahun lalu.

Penerimaan cukai didominasi oleh CHT yang berkontribusi hingga 95 persen. Fungsi pengendalian pada cukai, berupa kebijakan pengenaan tarif BKC terutama tarif CHT, efektif menurunkan produksi batang rokok. Namun demikian di sisi penerimaan, faktor kenaikan tarif efektif yang

melebihi kenaikan tarif normatif mampu menopang pertumbuhan penerimaan CHT. Efektifitas program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga berperan mendorong kinerja penerimaan cukai HT, terutama dalam menekan peredaran rokok ilegal yang semula 12,14 persen menjadi hanya 7,04 persen. Hal ini menjadikan persaingan di industri hasil tembakau menjadi lebih sehat.

Surplus Penerimaan tahun 2018

Serangkaian kinerja positif yang konsisten sejak awal tahun tersebut, menjadikan capaian penerimaan kepabeanan dan cukai kembali melampaui target yang diamanatkan APBN tahun 2018. Total capaian penerimaan sebesar Rp205,49 triliun, dengan capaian total penerimaan lebih dari 105,9 persen. Surplus juga terjadi kembali pada seluruh komponen penerimaan yaitu BM sebesar Rp39,0 triliun atau 109,3 persen, cukai sebesar Rp159,7 triliun atau 102,8 persen, dan BK sebesar Rp6,8 triliun atau 225,4 persen.

(dalam triliun rupiah)

PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI	TARGET APBN 2018	REALISASI	% thd APBN
BEA MASUK	35,70	39,02	109,3
BEA KELUAR	3,00	6,76	225,4
CUKAI	155,40	159,69	102,8
TOTAL	194,10	205,47	105,9

Bea Cukai Implementasikan Pertukaran Data Elektronik Melalui Internet Mulai 1 Januari 2019



Bea Cukai mulai mengimplementasikan program Pertukaran Data Elektronik via Internet (PDE Internet) secara penuh di seluruh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai pada 1 Januari 2019. Hal ini merupakan salah satu langkah Kementerian Keuangan untuk dapat meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia sebagaimana arahan Presiden.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa

mengingat waktu penigimplementasian yang semakin dekat, maka para pengguna jasa diharapkan dapat mendukung pelaksanaan implementasi PDE internet ini secara keseluruhan. “Mulai 1 Januari 2019, penyampaian dokumen kepabeanan *via provider* tidak dapat lagi dilakukan. Untuk itu para pengguna jasa diminta agar memperhatikan beberapa hal di antaranya menyediakan layanan internet dengan *bandwidth* yang memadai untuk mendukung kelancaran pertukaran data, serta mencegah komputer yang digunakan

perusahaan terjangkit virus agar potensi perlambatan proses dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Otomasi sistem pelayanan merupakan hal yang tidak bisa lagi ditunda, apalagi di tengah perkembangan teknologi informasi yang bergerak dengan cepat dan revolusi industri 4.0 yang mengedepankan otomasi sistem dalam berbagai bidang kegiatan. “Hal tersebut mendorong DJBC untuk melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan layanan kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa,” lanjutnya.

Pengembangan sistem PDE Internet oleh DJBC telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Pada tahap awal, sistem yang mampu memfasilitasi pertukaran data antara pengguna jasa kepabeanan dengan DJBC di seluruh wilayah Indonesia, telah diimplementasikan secara bertahap di 60 Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk memproses dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sementara itu, PDE Internet

juga telah diimplementasikan di 83 Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk memproses dokumen *manifest* baik *inward* maupun *outward*.

DJBC berencana akan melanjutkan penerapan PDE Internet secara penuh terhadap 13 kantor pelayanan pada tahun 2019. Dalam rangka penerapan tersebut, maka secara bertahap sejak bulan Agustus 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi dan pelatihan instalasi kepada para pegawai, pengguna jasa termasuk perusahaan dan asosiasi, importir, eksportir dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, serta sosialisasi dan evaluasi implementasi PDE internet PIB dan PEB di 13 kantor pelayanan dan 5 kantor pelayanan pendukung.

Hingga akhir tahun 2018 lalu proses implementasi PDE Internet di Kantor-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai sebagian besar telah mencapai 100%, hanya di beberapa kantor saja yang masih terdapat pengguna jasa yang belum menggunakan PDE Internet. Beberapa

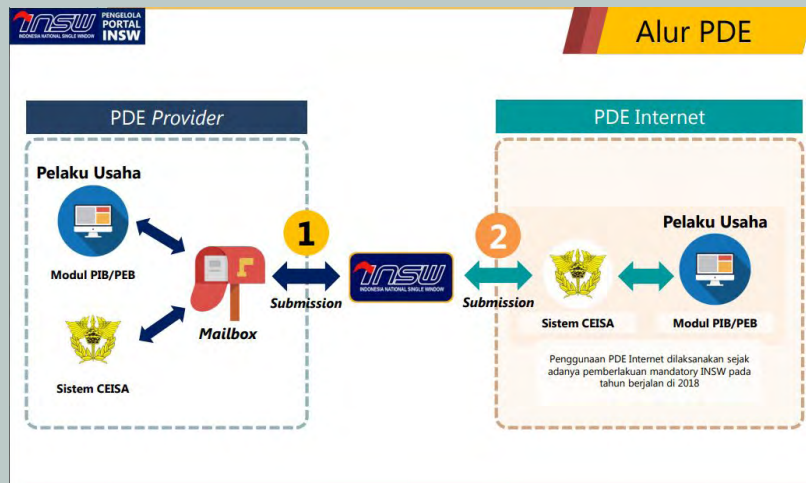
Kantor tersebut di antaranya Bea Cukai Bandung yang telah mengimplementasikan 100% PDE Internet. Hal tersebut serupa dengan Bea Cukai Bandar Lampung, Kuala Namu, Merak dan Ngurah Rai.

Sementara itu, beberapa kantor yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PDE Internet terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya pada Kantor Bea Cukai Belawan, dari 726 dokumen kepabeanan yang diproses, sebanyak 724 dokumen atau sekitar 99,7% telah menggunakan PDE Internet. Kantor Bea Cukai Juanda pun demikian, dari 189 dokumen sebanyak 187 dokumen atau sekitar

98,9% telah menggunakan PDE Internet.

Penerapan secara penuh PDE Internet di seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC merupakan komitmen nyata dalam pelaksanaan reformasi dan menjawab tuntutan zaman. Perubahan ini tentu ditujukan dapat menciptakan tata niaga yang lebih lebih efektif, mudah, cepat, murah, dan transparan. DJBC juga mengharapkan kerja sama baik dari Kementerian atau Lembaga terkait, serta para pengguna jasa untuk dapat segera mengimplementasikan program ini untuk guna mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia yang makin baik.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Hingga Akhir tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai 147,8 persen

Realisasi PNBPs/d 31 Des 2018
(dalam miliar Rupiah)

	2018 APBN	Realisasi s.d 31 Des 2018	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.427,92	407.055,61	147,79	30,80
A. Penerimaan SDA	103.674,80	181.064,41	174,65	62,93
1 Migas	80.349,00	143.266,40	178,31	75,05
a Minyak Bumi	59.582,70	104.615,12	175,58	79,74
b Gas Alam	20.766,30	38.651,28	186,12	-
2 Non Migas	23.325,80	37.798,01	162,04	29,05
a Pertambangan Minerba	17.858,52	30.308,92	169,72	27,55
b Kehutanan	4.166,71	4.760,12	114,24	16,05
c Perikanan	600,00	448,38	74,73	(8,69)
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	2.280,59	325,52	144,44
B Pendapatan dari KND	44.695,40	45.116,20	100,94	2,76
C. PNBPs Lainnya	83.753,12	127.215,00	151,89	16,89
D. Pendapatan BLU	43.304,60	53.660,00	123,91	13,34

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi PNBPs mencapai Rp407,06 triliun atau 147,79 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 30,80 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya rata-rata harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara

pada tahun 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp143,27 triliun atau 178,31 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 75,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih

tingginya realisasi ICP periode bulan Januari s.d. Desember 2018 sebesar USD 67,47 per barel, dibandingkan realisasi ICP bulan bulan Januari s.d. Desember 2017 sebesar USD 51 per barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai 37,80 triliun atau 162,04 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 29,05 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 29,30 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari s.d. Desember 2018 yang mencapai USD 98,96 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari s.d. Desember 2017 sebesar USD 85,92 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp45,12 triliun atau 100,94 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 2,76 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp43,90 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan perbaikan kinerja BUMN.

Realisasi penerimaan PNBPs Lainnya mencapai Rp127,21 triliun atau 151,89 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 16,89 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp108,83 triliun. Peningkatan realisasi penerimaan PNBPs Lainnya ini antara lain disebabkan kenaikan realisasi Penjualan Hasil Tambang yang mencapai Rp19,31 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp16,86 triliun, sejalan dengan peningkatan HBA dan terdapat penerimaan dari akumulasi iuran pensiun sebesar Rp7,70 triliun serta signature bonus sebesar Rp12,40 triliun

Untuk pendapatan BLU, hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp50,41 triliun dan sampai dengan pengesahan diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp53,66, atau mencapai 123,91 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat 13,34 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp47,34 triliun.



Foto:
Media Keuangan

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti dengan pencapaian berbagai sasaran output strategis

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.444,4 triliun (99,3 persen dari APBN 2018), atau 14,2 persen lebih tinggi dari realisasi tahun 2017. Realisasi tersebut meliputi Belanja K/L sebesar Rp836,2 triliun (98,7 persen dari APBN 2018), lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 95,8 persen. Kinerja BPP yang positif ini sangat dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan atas APBN di tahun 2018, sehingga pemerintah lebih fokus dalam melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan.

Secara umum kinerja BPP dipengaruhi oleh tingginya penyerapan sebagian besar komponen Belanja Pemerintah Pusat. Belanja pegawai terserap 94,81 persen antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan tunjangan kinerja

pada beberapa K/L dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi serta pemberian THR bagi pensiunan. Belanja barang terserap 99,07 persen antara lain dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan dan berbagai agenda strategis di K/L. Belanja bantuan sosial terserap 103,25 persen, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran ke-3 bagi peserta baru program keluarga harapan (PKH) dan realisasi dana cadangan penanggulangan bencana alam yang mencapai Rp5,93 triliun dari pagunya yang sebesar Rp4,0 triliun. Pembayaran bunga utang terserap 108,17 persen hal ini dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Subsidi terserap 138,76 persen hal ini dipengaruhi oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah dan ICP.

Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat

(Triliun Rupiah)

Uraian	2018			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Desember	% thd APBN	Growth
1. Belanja Pegawai	365,69	346,72	94,81	10,87
2. Belanja Barang	340,13	336,97	99,07	15,61
3. Belanja Modal	203,88	184,87	90,67	(11,40)
4. Pembayaran Bunga Utang	238,61	258,09	108,17	19,17
5. Subsidi	156,23	216,77	138,76	30,27
6. Belanja Hibah	1,46	1,53	104,56	(71,95)
7. Bantuan Sosial	81,26	83,90	103,25	51,72
8. Belanja Lain-Lain	67,24	15,59	23,19	77,10
JUMLAH	1.454,49	1.444,44	99,31	14,15

Disisi lain, kinerja belanja modal pada tahun 2018 sebesar 90,67 persen lebih rendah bila dibanding dengan kinerja tahun 2017. Perlu diketahui bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya bersumber dari belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan seluruh komponen APBN yang menghasilkan aset, yaitu terdiri atas belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/ masyarakat (Akun 52611), belanja modal (Akun 53), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Pembiayaan Investasi, menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja barang non-aset.

Belanja Pemerintah Pusat juga dapat di klasifikasikan ke dalam belanja K/L dan belanja non-K/L yang kinerja penyerapan tahun 2018 dielaborasi lebih lanjut.

A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2018

Realisasi sementara Belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2018

mencapai Rp836,2 triliun atau 98,68 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, bidik misi, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN), dan pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada Serentak, pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta dan Palembang tahun 2018, dan *Asian Para Games* di Jakarta tahun 2018. Selain itu, kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh dukungan tambahan belanja untuk kegiatan-kegiatan strategis tambahan lainnya, seperti: (1) kegiatan terkait penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2018; (2) penambahan alokasi PKH berupa penyaluran ketiga bagi penerima manfaat baru; (3) Penguatan

reformasi birokrasi di K/L; dan (4) dukungan untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Selanjutnya, kinerja penyerapan anggaran juga diikuti dengan kinerja pencapaian output, yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Di bidang infrastruktur (Kemen PUPR dan Kemenhub), telah tercapai pembangunan jalan 630 km, jembatan sepanjang 7.673,2 m, penyelesaian pembangunan 4 bandara dan lanjutan 4 bandara baru, serta pembangunan 452,9 km² rel kereta api. Pada bidang Pendidikan (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristekdikti) telah dilaksanakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar untuk 19,8 juta siswa, penyaluran bantuan operasional sekolah bagi 8,7 juta siswa, dan penyaluran bidik misi kepada 392,0 ribu mahasiswa. Di bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Kemenkes dan Kemensos), telah dilakukan penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,3 juta jiwa penerima bantuan iuran, dan penyaluran program keluarga harapan bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat, serta

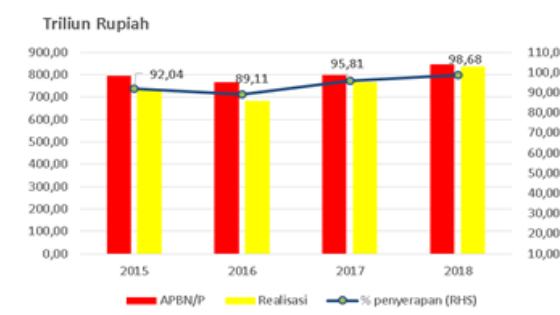
bantuan pangan non tunai untuk 15,2 juta keluarga.

Meskipun analisis kinerja menunjukkan optimisme dalam capaian target *output* maupun target penyerapan anggaran, dalam pelaksanaannya masih ada potensi kendala yang perlu diantisipasi, misal pada kementerian yang pekerjaannya berupa pembangunan fisik, antara lain: (1) pada penyediaan maupun pembebasan lahan terkait dengan permintaan ganti rugi lahan; (2) perpindahan lokasi proyek yang perlu kajian ulang; (3) dokumen teknis yang masih dalam proses revidi teknis; (4) masih perlu revidi UMP terhadap kegiatan yang akan dilelangkan; (5) keterlambatan proses pengadaan, keterlambatan memulai pekerjaan, beberapa paket masih proses lelang; dan (6) dokumen kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) yang belum lengkap.

B. REALISASI BELANJA NON K/L TAHUN 2018

Realisasi sementara belanja non-K/L tahun 2018 mencapai Rp608,23

Grafik
Perkembangan
Penyerapan
Belanja K/L



triliun atau mencapai 100,19 persen dari pagu APBN tahun 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja non-K/L, antara lain: (1) pembayaran bunga utang Rp258,09 triliun dan subsidi Rp216,77 triliun, dimana realisasi pembayaran bunga utang antara lain dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS; dan (2) realisasi subsidi mencapai Rp216,77 triliun atau 138,76 persen dari pagu APBN yang dipengaruhi oleh perubahan asumsi ICP dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, penyelesaian pembayaran kurang bayar subsidi energi tahun

sebelumnya, kebijakan penyesuaian subsidi solar dari Rp500/liter menjadi Rp2.000/liter sebagai upaya menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi.

Penyerapan dan realisasi belanja non-K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan pembayaran THR bagi pensiunan dan pencairan dana cadangan program JKN untuk menutupi defisit DJS Kesehatan. Tingkat penyerapan belanja non-K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun 2017.

Capaian Output Strategis K/L

Indikator	Target	Real s.d. Des.	Indikator	Target	Real s.d. Des.	Indikator	Target	Real s.d. Des.
KEMENPUPR			KEMENDIKBUD			KEMENSOS		
Pembangunan Jalan Baru (km)	811,5	630,28	Penyaluran KIP (siswa)	17,9 juta	18,7 juta	Penyaluran PKH (KPM)	10,0 juta	10,0 juta
Pembangunan Jalan Tol (km)	33,1	27,9	Rehab/bangun ruang kelas	248 ribu	28,5 ribu	Bantuan Pangan	15,6 juta	15,2 juta
Pembangunan Jembatan (m)	15.373,0	7.673,2	KEMENAG			KEMENHAN		
KEMENHUB			Penyaluran KIP (siswa)	1,7 juta	1.635.244	Peningkatan/ Pengadaan/ Penggantian Alutsista, a.l:		
Pembangunan Bandara	4	4	Penyaluran BOS (siswa)	8,7 juta	8.888.938	*Alpung, Kri, Kai dan Ranpur/ Rantis Matra Laut	13	-
Pembangunan Rel KA (km/sp)	366	347,7	Penyaluran Blaik Misi (mahasiswa)	32 ribu	17.810	*MKK (unit)	1.176.109	626.937
BNN			KEMENRISTEKDIKT			POLRI		
Deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di Instansi Pemerintah	25.001	14.396	Penyaluran Blaik Misi (ribu mahasiswa)	368.961	315.833	Progres Pengadaan		
Berkas Perkarat Tindak Pidana Narkotika (berkas)	700	1.024	KEMENKES			a. Alimatus (unit)	496.734	371.858
Berkas Perkarat TPFU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (berkas)	46	33	Penyaluran JKN-KIS (juta)	92,4 juta	92,3 juta	b. Rumahin Personil (unit/KK)	4.654	2.006

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Kenaikan Capaian Realisasi Dana Perimbangan, wujud komitmen Pemerintah mengatasi Ketimpangan antar Daerah

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun, terealisasi sebesar Rp757,79 triliun (98,91 persen dari pagu alokasi TKDD). Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp15,80 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD tahun 2017 sebesar Rp741,99 triliun (96,82 persen dari pagu alokasi). Hampir seluruh komponen TKDD 2018 menunjukkan adanya kenaikan realisasi dibandingkan tahun lalu atau bahkan terealisasi 100 persen dari pagu alokasinya.

A. DANA PERIMBANGAN

Komponen terbesar dari TKDD adalah Dana Perimbangan, yang pada APBN Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun atau 88,31 persen dari keseluruhan alokasi TKDD. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer

Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun. Realisasi Dana Perimbangan tahun 2018 mencapai Rp668,64 triliun atau 98,82 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp14,16 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp654,48 triliun, atau 96,45 persen dari pagu APBNP 2017.

1. DANA TRANSFER UMUM (DTU)

DTU terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dinamakan sebagai transfer umum karena sifatnya yang relatif bebas digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. DTU mempunyai peranan yang sangat penting bagi APBD karena merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah. Untuk tahun 2018, realisasi DTU mencapai Rp495,19 triliun, atau 100,91 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Capaian tahun ini meningkat Rp8,38 triliun jika dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya mencapai Rp486,81 triliun atau 98,55 persen dari pagu alokasi.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Di tahun 2018, penyaluran DAU kembali berhasil mencapai Rp401,49 Triliun atau 100 persen dari yang dialokasikan. Realisasi penyaluran DAU tahun 2018 telah memperhitungkan penyelesaian atas beberapa kewajiban pemerintah daerah. Pertama, penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman daerah pada satu daerah sebesar Rp5,65 Miliar. Kedua, penyelesaian pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada BPJS terhadap 42 daerah sebesar Rp264,0 Miliar. Ketiga, Penyelesaian kewajiban hibah atas daerah induk kepada DOB pada 6 daerah sebesar Rp26,75 Miliar. Keempat, penyelesaian lebih salur DAK TA 2016 terhadap 64 daerah sebesar Rp48,93 Miliar.

Penyaluran DAU TA 2018 senantiasa memperhatikan kepatuhan daerah dalam penyampaian Informasi

Keuangan Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2018 masih terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan berupa: a) Laporan Informasi Keuangan Daerah sebanyak 13 daerah (Rp82,25 M); dan b) LPP APBD 2017 sebanyak 1 daerah (Rp65,98 M). Namun demikian, berdasarkan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011, dalam hal Pemerintah Daerah masih dikenakan sanksi penundaan DAU sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir. Menjalankan mandat dari PMK tersebut, di tahun 2018 penyaluran DAU kembali mencapai realisasi penuh atau 100 persen dari alokasi TA 2018.

Namun demikian, terhadap daerah yang belum menyampaikan laporan IKD tersebut kembali dilakukan penundaan DAU pada penyaluran tahun 2019 sampai dengan pemerintah daerah menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan

amanat pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011.

b. Realisasi penyaluran DBH tahun

2018 mencapai angka Rp93,70 triliun atau 105,02 persen dari pagu alokasi. Meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp88,23 triliun atau 92,51 persen.

Penerimaan DBH CHT di daerah digunakan untuk mendanai program sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana pengaturan teknisnya diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Berdasarkan evaluasi secara umum, penggunaan DBH CHT telah mencapai 50 persen untuk bidang kesehatan yang mendukung program JKN melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.

Sementara itu, perluasan penggunaan DBH DR baik untuk DBH DR tahun 2018 yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi maupun penggunaan atas sisa DBH DR yang masih ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota sampai dengan tahun 2017, diatur melalui PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH DR, dimana prioritas penggunaan minimal 50 persen untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penetapan peraturan teknis penggunaan DBH DR dimaksud telah memberikan kepastian bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk dapat menganggarkan dan menggunakan DBH DR dalam APBD. Berdasarkan evaluasi secara umum pemerintah daerah telah menganggarkan 72,4 persen DBH DR di APBD TA 2018 untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2. DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)

DTK mempunyai peran yang sangat strategis, karena dalam komponen transfer khusus inilah Pemerintah Pusat akan mempunyai peranan untuk mempengaruhi pola belanja daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan layanan antar-daerah. Hal ini dilakukan melalui earmarking (pengarahan/ penentuan) penggunaan dari DTK. Dalam APBN 2018, DTK dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Selama tahun 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp173,45 triliun, atau 93,31 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp5,78 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp167,67 triliun, atau 90,81 persen dari pagu APBNP 2017.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap, dengan besaran penyaluran 25 persen tahap I, 45 persen tahap II, dan tahap III sebesar selisih antara kebutuhan pendanaan kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan. Hal tersebut berbeda dengan tahun 2017, dimana tahun sebelumnya, DAK Fisik disalurkan dalam empat periode triwulanan. Untuk tahun 2018, penyaluran DAK Fisik yang didasarkan pada besaran kontrak kegiatan, capaian kinerja penyerapan dana, dan capaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terealisasi sebesar Rp58,15 triliun atau 93,13 persen dari pagu alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp62,44 triliun. Realisasi DAK Fisik tersebut lebih tinggi secara persentase jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 89,32 persen, sehingga menunjukkan bahwa kinerja penyaluran DAK Fisik tahun 2018 lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Realisasi DAK Fisik tahun 2018 tersebut terdiri dari : (i) DAK Reguler sebesar Rp29,41 triliun, (ii) DAK Penugasan sebesar Rp22,49 triliun, dan (iii) DAK Afiriasi sebesar Rp6,25 triliun.

Dari total 15 bidang DAK Fisik tahun 2018, 3 bidang dengan persentase penyaluran tertinggi antara lain: (1) Bidang Pendidikan mencapai 96,18 persen; (2) Bidang Sanitasi mencapai 95,43 persen; dan (3) Bidang Jalan mencapai 95,36 persen. Sebaliknya, 3 bidang dengan persentase penyaluran

terendah yaitu: (1) Bidang Energi Skala Kecil mencapai 61,45 persen; (2) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 78,74 persen; dan (3) Bidang Transportasi mencapai 88,55 persen.

Bencana alam merupakan salah satu penyebab tidak dapat dipenuhinya syarat penyaluran DAK Fisik, yang didasarkan pada kinerja kemajuan pelaksanaan kegiatan. Terkait hal tersebut, daerah terdampak bencana diberikan dispensasi syarat penyaluran melalui PMK No. 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Kebijakan relaksasi penyaluran dilakukan dengan meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, dan minimal capaian output pada penyaluran tahap kedua dan ketiga. Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik ke daerah terdampak bencana tetap dapat dilakukan dan dapat digunakan pemerintah daerah dalam membantu pembangunan kembali pasca gempa.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun pada APBN 2018, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Realisasi penyaluran DAK Nonfisik di tahun

2018 mencapai Rp115,30 triliun, atau 93,40 persen dari pagu alokasi dalam APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp9,74 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp102,79 triliun atau 91,71 persen dari pagu alokasi.

Penyaluran seluruh jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada tahun 2018 mensyaratkan pelaporan (kinerja) sebagai syarat penyaluran. Seiring dengan membaiknya pemahaman dan kedisiplinan pelaporan daerah, realisasi Dana BOK, BOKB, TPG dan PK2UKM relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran BOK dan BOKB mengalami peningkatan tertinggi diantara seluruh jenis Dana DAK Nonfisik dari sebesar 81,8 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 88,9 persen pada tahun 2018. Realisasi Dana BOS, BOP PAUD, Tamsil, TKG dan Adminduk sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dikarenakan adanya optimalisasi sisa dana di Kas Daerah.

Dalam upaya meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya melalui koordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah dalam percepatan penyampaian laporan DAK Nonfisik dan mendorong daerah dalam mengoptimalkan penyerapan dana di daerah yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, pemberitahuan melalui surat kepada daerah, bimbingan teknis aplikasi pelaporan DAK Nonfisik, serta kegiatan lainnya.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Pada APBN 2018, pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun. Realisasi penyaluran DID tahun 2018 mencapai Rp8,23 triliun atau 96,83 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah secara persentase jika dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sebesar Rp7,50 triliun atau 100 persen. Lebih rendahnya persentase realisasi penyaluran DID tersebut terutama disebabkan karena adanya perubahan pola penyaluran DID yang mensyaratkan adanya kinerja penyerapan dalam penyaluran tahap II, yang pada tahun sebelumnya tidak dipersyaratkan. Sebagaimana diketahui, penyaluran DID tahun 2018 dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Penyaluran tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Februari sebesar 50 persen dari pagu. Sedangkan penyaluran tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen dengan persyaratan Pemda telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen. Pemda menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I tersebut paling lambat bulan Agustus. Dari 313 Pemerintah Daerah yang mendapat alokasi DID, terdapat 28 (dua puluh delapan) daerah dengan nilai sebesar Rp269,25 miliar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga penyaluran tahap II-nya tidak dapat dilaksanakan.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada

Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun. Sama seperti tahun sebelumnya, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2018 kembali mencatat capaian 100 persen.

Hal serupa juga terjadi di sisi penyaluran Dana Keistimewaan pada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) yang berhasil terealisasi penuh sebesar Rp1,00 triliun di tahun 2018.

D. DANA DESA

Di tahun 2018, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD mencapai Rp59,86 triliun, atau 99,77 persen dari pagu alokasi sebesar Rp60,00 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp59,77 triliun atau 99,61 persen dari pagu alokasi. Perbaikan realisasi penyaluran disebabkan adanya kebijakan penyaluran Dana Desa sejak bulan Januari serta koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera melaksanakan Dana Desa dan segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.339,33	741.992,38	96,82	766.162,58	757.792,94	98,91
Transfer ke Daerah	706.339,33	682.225,80	96,59	706.162,58	697.933,53	98,83
A. Dana Perimbangan	678.596,04	654.482,51	96,45	676.602,99	668.643,20	98,82
1. Dana Transfer Umum	493.959,54	486.814,51	98,55	490.714,92	495.193,62	100,91
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	88.232,20	92,51	89.225,34	93.704,04	105,02
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	398.582,31	100,00	401.489,58	401.489,58	100,00
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	167.668,00	90,81	185.888,07	173.449,58	93,31
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	62.104,23	89,32	62.436,26	58.149,30	93,13
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	105.563,77	91,71	123.451,81	115.300,28	93,95
B. Dana Insentif Daerah	7.500,00	7.500,00	100,00	8.500,00	8.230,75	96,83
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,29	20.243,29	100,00	21.059,58	21.059,58	100,00
1. Dana Otsus	19.443,29	19.443,29	100,00	20.059,58	20.059,58	100,00
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,65	7.971,65	100,00	8.029,79	8.029,79	100,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	7.971,65	100,00	8.029,79	8.029,79	100,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,00	3.500,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,00	800,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Dana Desa	60.000,00	59.766,58	99,61	60.000,00	59.859,41	99,77



Foto:
Media Keuangan

PEMBIAYAAN UTANG

Pengelolaan Utang yang pruden dan akuntabel ditengah kondisi pasar 2018 yang volatile,rasio utang Pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB.

Sepanjang tahun 2018, Pengelolaan Pembiayaan Utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir tahun 2018 semakin menurun baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun untuk Pinjaman (Neto) serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan.

Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2018 adalah penerbitan Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. Green Global Sukuk dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di 4 (empat) Kementerian/ Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya pada bulan April 2018, Pemerintah menggunakan US SEC

Shelf Registration dalam mekanisme penerbitan SBN yang memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar.

Momentum pendalaman pasar guna menggarap pasar Indonesia yang masih sangat luas namun belum terkelola dengan baik terjadi pada tahun 2018 juga. Pemanfaatan kemajuan teknologi finansial (Fintech) dilakukan pemerintah melalui penerbitan SBR (Savings Bond Retail) 003 dan SBR 004 serta ST (Sukuk Tabungan) 002. Hasil yang diperoleh sangat menggembirakan dimana masing-masing SBR dan ST mengalami oversubscribe. Sementara itu, profil pembeli ST-002 sebagian besar adalah millennial dan hal tersebut merupakan hal yang menggembirakan karena berarti millennial sudah mulai paham terhadap produk keuangan dan investasi, serta adanya kesadaran kaum millennial untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pembiayaan Utang

	2018	Realisasi		
	APBN	s.d. 31 Desember 2018	% APBN	% Growth (yoy)
Pembiayaan Utang	399,2	366,7	91,8	(14,5)
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414,5	358,4	86,5	(18,9)
2. Pinjaman (Neto)	(15,3)	8,3	(54,0)	(165,4)

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan inovasi bagi pembiayaan karena pada tahun 2018 pula diluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia One. Platform ini merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di Indonesia.

SDGs Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility) dan fasilitas investasi (equity fund). Fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban fiskal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.

Untuk tahun 2019, proyeksi pembiayaan anggaran pemerintah

direncanakan semakin menurun, ketergantungan terhadap utang valuta asing terutama untuk Surat Berharga Negara (SBN) juga diproyeksikan menurun. Rasional penurunan ketergantungan terhadap utang valuta asing didasarkan atas beberapa hal yaitu

1. Menghindari fluktuasi mata uang asing dan kemungkinan kenaikan yield SBN akibat adanya kebijakan tight money policy dari the Fed di tahun 2019 ini, perang dagang yang diperkirakan masih terus akan berlanjut serta adanya kemungkinan Brexit jilid 2 dari negara-negara Eropa;
2. Adanya rencana penerbitan SBN retail secara online setiap bulan dalam rangka pendalaman pasar dalam negeri sehingga masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia;

Hingga akhir 2018, Produk Domestik Bruto Indonesia masih sanggup menutup lebih dari 3 kali kali total utang yang outstanding. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada

tahun 2018 mengalami pertumbuhan tertinggi untuk Pembiayaan baik SBSN bermata uang Rupiah yang kenaikannya sebesar 13,45 persen dibandingkan tahun 2017 maupun SBSN bermata uang asing yang kenaikannya sebesar 24,84 persen dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan porsi SBSN terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek

disebabkan fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, SBSN merupakan salah satu instrumen inovasi pembiayaan (creative financing) yang menjadi "hot issue" pembangunan infrastruktur tahun 2018.

Posis Utang Hingga Akhir Desember 2018

	<i>(dalam Triliun Rupiah)</i>			
	Desember-17		Desember -18*	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	3.995,25	100,00%	4.418,30	100,00%
a. Pinjaman	746,32	18,68%	805,62	18,23%
1. Pinjaman Luar Negeri	740,54	18,54%	799,04	18,08%
Bilateral	314,46	7,87%	330,95	7,49%
Multilateral	381,79	9,56%	425,49	9,63%
Komersial	43,12	1,08%	42,60	0,96%
Suppliers	1,17	0,03%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,78	0,14%	6,57	0,15%
b. Surat Berharga Negara	3.248,93	81,32%	3.612,69	81,77%
1. Denominasi Rupiah	2.341,10	58,60%	2.601,63	58,88%
Surat Utang Negara	1.958,89	49,03%	2.168,01	49,07%
Surat Berharga Syariah Negara	382,21	9,57%	433,63	9,81%
2. Denominasi Valas	907,83	22,72%	1.011,05	22,88%
Surat Utang Negara	738,48	18,48%	799,63	18,10%
Surat Berharga Syariah Negara	169,35	4,24%	211,42	4,79%
Rasio Utang thd PDB			29,98%	
Pendapatan Domestik Bruto**			14.735,85	

* Tidak termasuk penerbitan *SUN Valas 2019 pre-funding* senilai Rp43,44 triliun

** Angka Sementara PDB tahun 2018

Secara keseluruhan pembiayaan infrastruktur melalui SBSN tahun 2018 naik menjadi Rp 22,53 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun. Pembiayaan sebesar Rp 22,53 triliun akan digunakan untuk membiayai 587 proyek pada 7 Kementerian/Lembaga (Kemenag, Kemenhub, Kemenpupera, Kemenristekdikti, LIPI, Kemen LHK, dan Badan Standardisasi Nasional) yang tersebar di 34 provinsi.

Pada 2018, Pinjaman Luar Negeri masih didominasi oleh pinjaman dari lembaga multilateral diantaranya the World Bank, ADB dan IDB

sementara pinjaman bilateral seperti JICA merupakan urutan kedua dalam pinjaman luar negeri dalam pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Walau semakin menurun, pinjaman luar negeri tetap dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengingat melalui pinjaman luar negeri ini akan ada "transfer of knowledge" dari donor serta dukungan teknis dari ahli-ahli masing-masing lembaga donor terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

MENAKAR KUALITAS BELANJA DENGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketercapaian *output* tersebut, tentunya harus didukung oleh regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara terkendali, terarah, dan terukur. Oleh sebab itu, untuk menakar belanja yang berkualitas diperlukan suatu ukuran-ukuran kinerja yang menggambarkan bagaimana K/L mengelola anggarannya.

Selama ini, ukuran kinerja pengelolaan anggaran dicerminkan oleh tingkat realisasi anggaran, artinya semakin

besar K/L tersebut menyerap/merealisasikan anggarannya, maka K/L tersebut dianggap telah berhasil dalam mengelola anggaran pada unitnya. Namun demikian, sejak tahun 2015, dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, Kementerian Keuangan telah menginisiasi pengembangan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA sendiri saat ini memiliki 4 aspek dalam pelaksanaan anggaran, yakni: kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan, dan efisiensi pelaksanaan, serta 12 indikator yang memanfaatkan data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran di seluruh pelosok tanah air. Kedua belas indikator tersebut, terdiri atas:

Penyerapan Anggaran yang menunjukkan persentase atau tingkat serapan anggaran K/L dibandingkan dengan pagu atau alokasi anggarannya;

Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menunjukkan rata-rata penyimpangan atau deviasi antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi anggaran bulanan K/L;

Penyelesaian Tagihan yang menunjukkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual oleh K/L;

Revisi DIPA menunjukkan rasio atas jumlah revisi anggaran yang diajukan oleh K/L;

Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menunjukkan rasio pengembalian tagihan (dalam hal ini SPM) Satker yang ditolak oleh sistem karena belum memenuhi persyaratan tagihan;

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang menunjukkan rasio ketepatan waktu pengisian kembali Uang Persediaan (Ganti Uang Persediaan/GUP);

Data Kontrak yang menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak Satker K/L;

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang menunjukkan rasio ketepatan waktu LPJ Bendahara yang disampaikan Satker K/L;

Dispensasi Penyampaian SPM yang menunjukkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi atas keterlambatan penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran;

Perencanaan Kas (Renkas) yang menunjukkan rasio ketepatan waktu

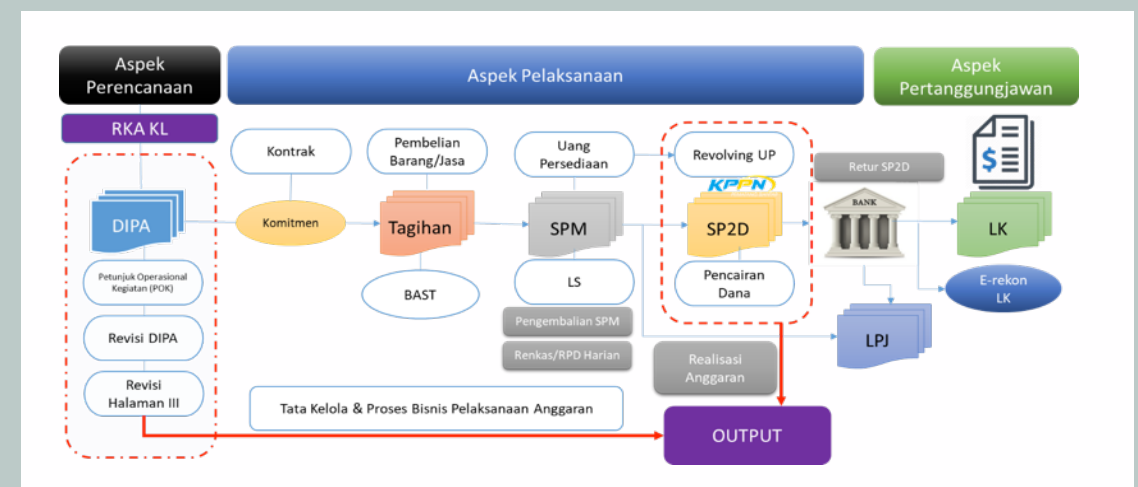
penyampaian Renkas sesuai kategori nilai rencana penarikan dana;

Pagu Minus yang menunjukkan persentase pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu anggarannya; dan

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menunjukkan rasio antara SP2D yang dikembalikan dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

Penggunaan IKPA merupakan sebuah bentuk perubahan *mindset* bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi penyerapan anggarannya saja mengingat cukup banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam *database* pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan *big data* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penganggaran sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

Diagram Kerangka Pengukuran IKPA



Hal ini penting juga guna mendukung perumusan kebijakan atas perbaikan sistem dan proses bisnis pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan. Dengan IKPA sebagai alat ukur kinerja atas K/L dalam mengelola anggarannya, maka diharapkan *output delivery*/tersedianya barang dan jasa pemerintah akan semakin terjamin dan berkualitas, sehingga dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

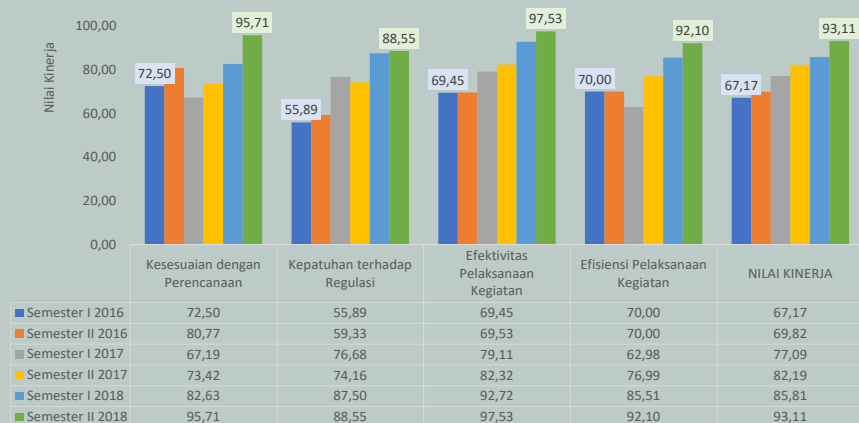
Pada praktiknya, mulai tahun 2018 data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*. Aplikasi tersebut mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring

dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan level Satker K/L secara *real time*, sehingga K/L dapat dengan cepat dan tepat melakukan perbaikan atas kinerja pelaksanaan anggarannya.

Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, maka dapat dilihat perkembangan IKPA agregat dari seluruh K/L yang dinilai selama 3 tahun terakhir (2016-2018), terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari 67,17 (2016) menjadi 93,11 (2018). Hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi monev pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan, serta sinergi dan upaya dari seluruh K/L dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya guna mewujudkan belanja yang semakin berkualitas.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Grafik
Perkembangan
Capaian IKPA
Agregat K/L
Tahun 2016-2018



Realisasi APBN s.d. 31 Desember tahun 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 31 Desember	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Desember	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1,736,060.1	1.666.375,9	95,99%	1,894,720.4	1.942.342,0	102,51%
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1,732,952.0	1.654.746,1	95,49%	1,893,523.5	1.928.442,0	101,84%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,472,709.9	1.343.529,8	91,23%	1,618,095.5	1.521.381,1	94,02%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,242.1	311.216,3	119,59%	275,428.0	407.060,9	147,79%
II. HIBAH	3,108.1	11.629,8	374,17%	1,196.9	13.900,0	1161,37%
B. BELANJA NEGARA	2,133,295.9	2.007.351,8	94,10%	2,220,657.0	2.202.238,9	99,17%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1,366,956.6	1.265.359,4	92,57%	1,454,494.4	1.444.445,9	99,31%
1. Belanja K/L	798,585.3	765.134,0	95,81%	847,435.2	836.215,3	98,68%
2. Belanja Non /L	568,371.3	500.225,4	88,01%	607,059.2	608.230,6	100,19%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,339.3	741.992,4	96,82%	766,162.6	757.792,9	98,91%
1. Transfer ke Daerah	706,339.3	682.225,8	96,59%	706,162.6	697.933,5	98,83%
2. Dana Desa	60,000.0	59.766,6	99,61%	60,000.0	59.859,4	99,77%
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178,039.4)	(124.407,9)	69,88%	(87,329.5)	(1.801,6)	2,06%
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(397,235.8)	(340.975,9)		(325,936.6)	(259.895,9)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,92)	(2,51)		(2,19)	(1,76)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	397,235.8	366.623,8	92,29%	325,936.6	300.360,9	92,15%
I. PEMBIAYAAN UTANG	461,343.6	429.076,6	93,01%	399,219.4	366.663,0	91,84%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,733.8)	(59.754,1)	100,03%	(65,654.3)	(61.113,8)	93,08%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,668.7)	(2.052,4)	55,94%	(6,690.1)	(4.250,0)	63,53%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,005.4)	(1.005,4)	100,00%	(1,121.3)	(1.121,3)	100,00%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300.0	359,1	119,70%	183.0	183,0	100,00%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	25.647,9		-	40.465,0	

